



Pemerintah Daerah  
Kabupaten Sumedang

Monumen  
Lingga



Alun-Alun  
Sumedang

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



Twin  
Tunnel



Jalan Tol  
Cisumdawu



Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah

Follow Us :  
@bappedasumedang





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini atas dasar perubahan usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan.

Sumedang,..... 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



**Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos. M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAERAH</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Bappppeda Sumedang.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang BAPPPEDA.....	20
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>18</b>
2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	27
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Kab/Kota .....	29
3.3 Telaah Tata Ruang dan Dokumen KLHS .....	32
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	32
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>34</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	34
<b>BAB V STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>36</b>
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BAPPPEDA .....	36
5.2 Arah Kebijakan Kebijakan yang diterapkan oleh BAPPPEDA .....	38
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>81</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>84</b>

# **BAB 1**

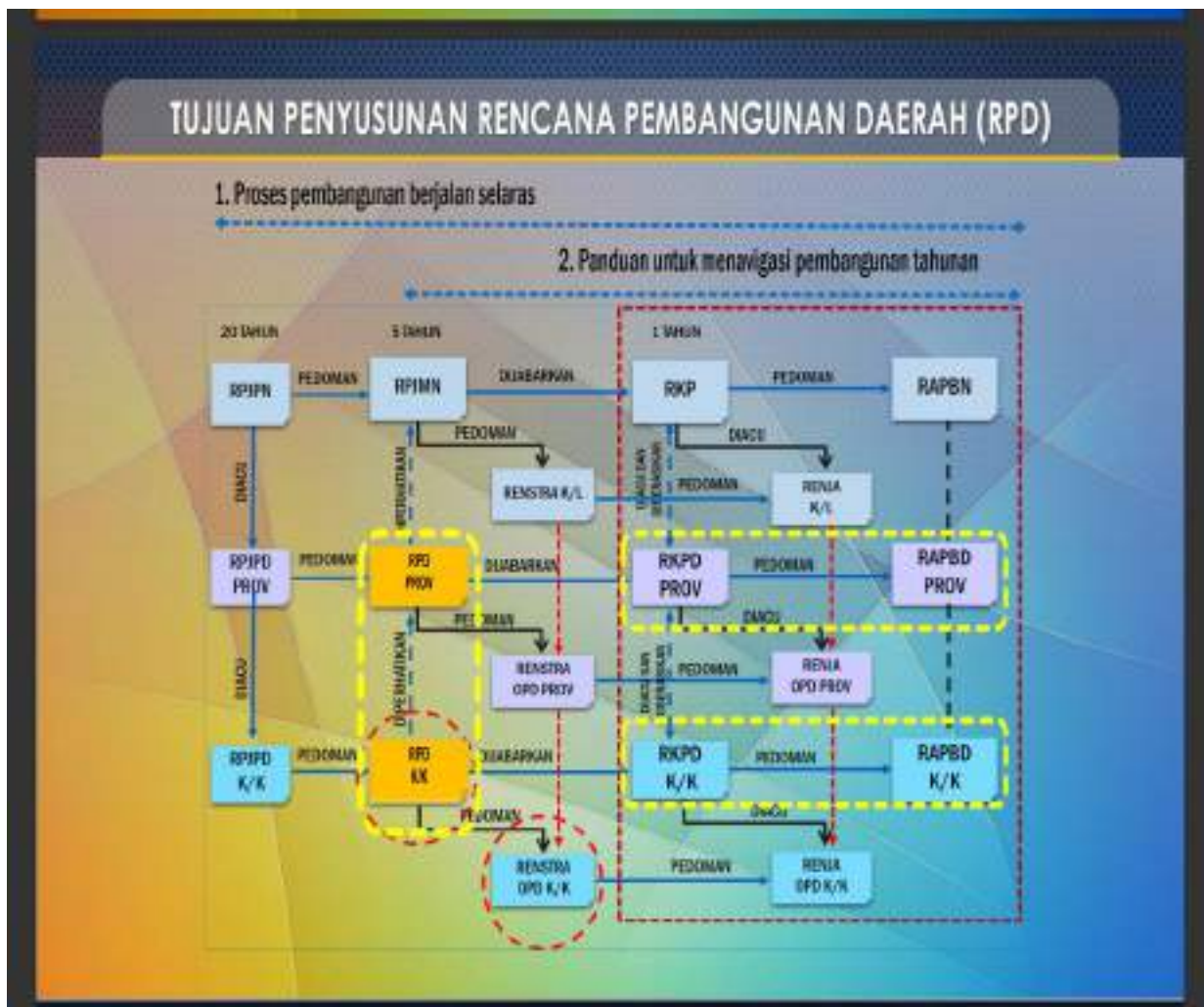
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Renstra disusun secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Renstra Bappppeda digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu masa perencanaan Tahun 2024-2026, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai salah satu bagian komponen perencanaan. Kedudukan Renstra terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:





Gambar 1.1 Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
9. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata



cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
27. Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
31. Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementrian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
35. Kepmendagri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah);
36. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
37. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor        Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2024 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor...);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
45. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten
47. Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang
52. Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
54. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan dalam di Perencanaan tahunan selama tahun dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Bappppeda adalah :

- a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah dan



evaluasi kinerja pada periode tahun 2018-20123;

- b. Merumuskan rencana kerja (Renja) dan kerangka pendanaan perangkat daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Bappppeda disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategi.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Bappppeda.

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja serta kebutuhan Pendanaan.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan periode berikutnya

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, paragraph 23 Pasal 68 (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah (Bappppeda) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang

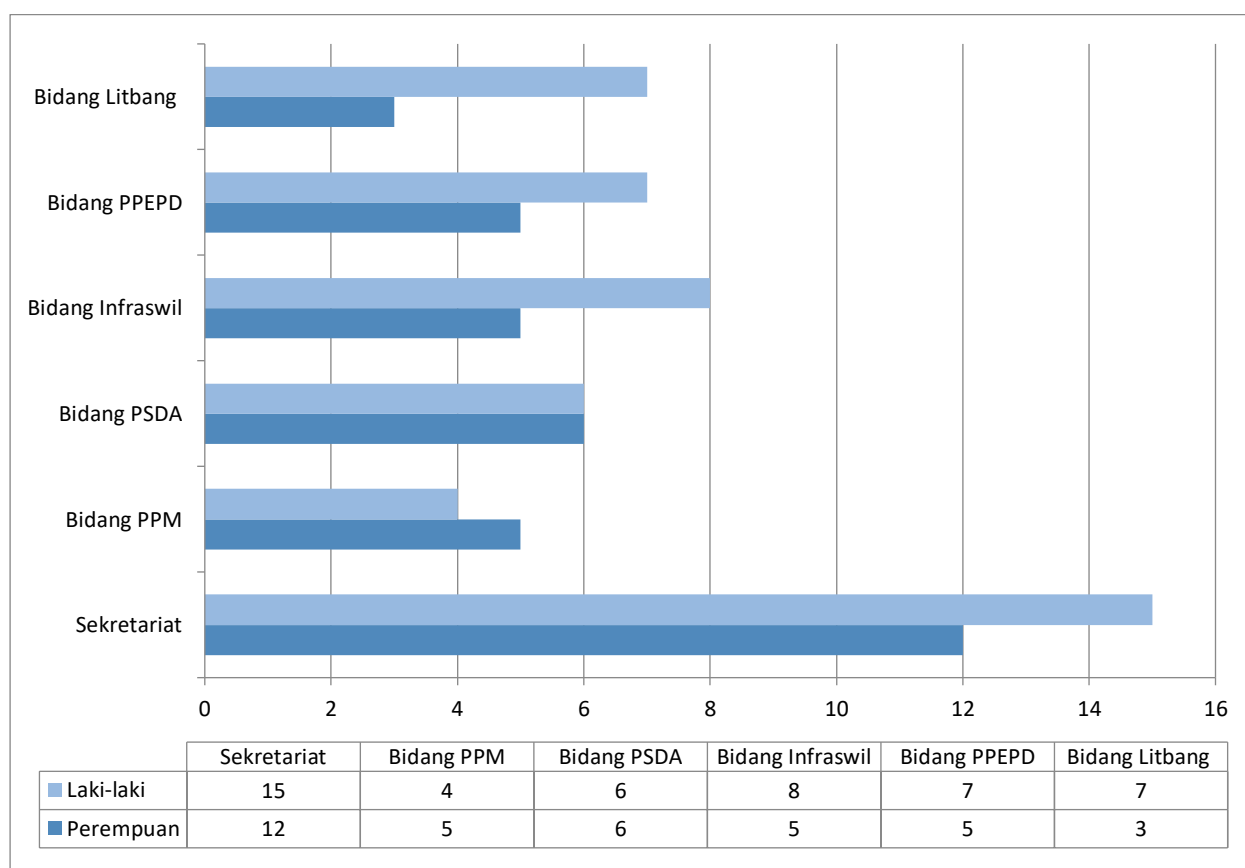


## 2.2 Sumber Daya Bappppeda Sumedang

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian/ Sumber Daya Manusia (SDM)

#### 2.2.1.1 Profil Kepegawaian Bappppeda

Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap / Non ASN. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah pegawai pada Bappppeda Kabupaten Sumedang adalah 83 orang yang terdiri dari 53 orang ASN dan 30 orang Non ASN, dengan kondisi sebagai berikut :



*Gambar 2.2*  
*Jumlah Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022*

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa pegawai Bappppeda didominasi oleh laki-laki sebanyak 47 orang atau sekitar 56,63 % dibandingkan dengan perempuan sebanyak 36 orang atau sekitar 43,36 %.

#### **2.2.1.2 Profil Pejabat Struktural Bappppeda**

Berdasarkan kondisi kepegawaian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara Di Bappppeda Kabupaten Sumedang sebanyak 51 orang dengan tingkat keterisii jabatan sebesar 100% yang terdiri dari 2 orang eselon II, 5 orang eselon III , 2 orang eselon IV dan yang lainnya adalah JFT 11 orang dan JFU 28 orang. Dari jumlah tersebut, distribusi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut : 1)eselon II Perempuan sebanyak 2 orang, 2)eselon III laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang, serta 3)eselon IV laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 1 orang.

#### **2.2.1.3 Pejabat Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Bappppeda Sumedang menindaklanjuti Permenpan RB tersebut menduduki jabatan fungsional penyetaraan sebanyak 6 orang sedang Fungsional madya 1 orang dan Fungsional Penelitian 1 orang, fungsional umum 14 orang.

#### **2.2.1.4 Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappppeda Kabupaten Sumedang**

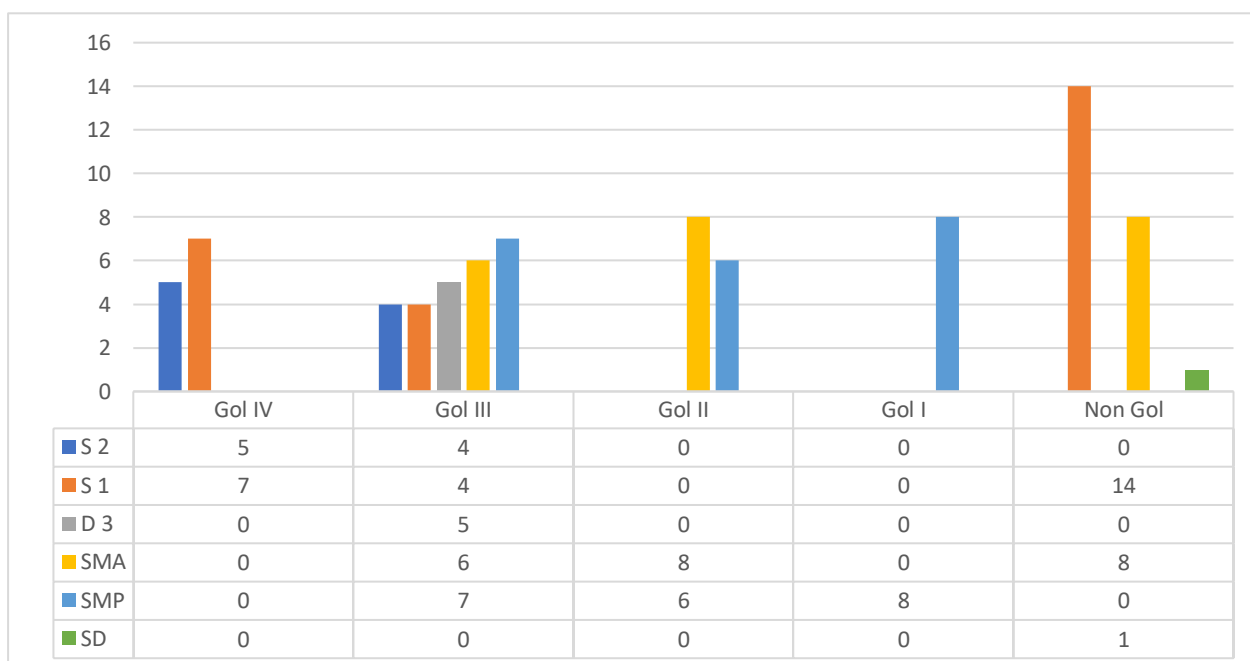
Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappppeda Kabupaten Sumedang Menurut Golongan Pangkat didominasi golongan III sebanyak 44 orang atau 72,13% dari seluruh ASN Bappppeda Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II dan golongan IV masing-masing sebesar 13,11% yaitu berjumlah masing-masing 8 orang dan sisanya sebesar 1.64% adalah golongan I yaitu sebanyak 1 orang.

Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappppeda Kabupaten Sumedang Menurut Golongan Pangkat

Unit	Gol 1	Gol 2	Gol 3	Gol 4	Jumlah
Kepala Badan				1	1
Sekretariat		2	9	1	12
Bidang Infracwil	1	1	6	2	10
Bidang PPM		1	4	2	7
Bidang PSDA		1	4	2	7
Bidang Litbang		1	5	2	8
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>53</b>

### 2.2.1.5 Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Memperhatikan gambar diatas dapat diketahui bahwa pegawai di Bappppeda kebanyakan adalah lulusan S 1 sebanyak 25 orang atau sekitar 30,12 %, SMA sebanyak 22 orang atau sekitar 26,5 %, dan S 2 sebanyak 9

orang atau sekitar 10,84 %. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa berdasarkan pendidikan pegawai Bappppeda memiliki kekuatan sumber daya manusia yang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola proses perencanaan daerah di Kabupaten Sumedang.

### 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	URAIAN	JUMLAH		PENAMBAHAN
		NERACA ASET Agustus 2022	NERACA AKUTANSI Agustus 2022	
1	2	3	4	5 (4-3)
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	11,836,539,324.73	11,836,539,324.73	-
3	Gedung dan Bangunan	11,021,509,771.91	11,021,509,771.91	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	108,034,877.20	108,034,877.20	-
5	Aset Tetap lainnya	-	-	-
6	K D P	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan (-)	-	(12,716,544,015.00)	(12,716,544,015.00)
	<b>A. Jumlah Aset Tetap</b>	<b>22,966,083,973.84</b>	<b>10,249,539,958.84</b>	<b>(12,716,544,015.00)</b>
	<b>B. Aset Lainnya</b>	<b>1,230,969,311.68</b>	<b>298,827,428.43</b>	<b>(932,141,883.25)</b>
	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Aset Tak Berwujud	862,677,094.80	862,677,094.80	-
	Aset Lain-lain	368,292,216.88	368,292,216.88	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	(339,277,047.00)	(339,277,047.00)
	Amortisasi Aset Tak Berwujud (-)	-	(592,864,836.25)	(592,864,836.25)
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>24,197,053,285.52</b>	<b>10,548,367,387.27</b>	<b>(13,648,685,898.25)</b>
8	Daftar Ekstrakontabel	36,036,583.13		(36,036,583.13)

Gambar 2.4 Daftar Aset Sampai Dengan Tahun 2022

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum masih mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappppeda Sumedang. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.



### **2.2.3 Instrumen Pendukung**

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan,serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Sumedang Bappppeda Sumedang menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam meningkatkan kapasitas Bappppeda sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.Sistem informasi yang dibangun tersebut : sicerdas, simpati, sigeol, website bappppeda dan instragram.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappppeda Kabupaten Sumedang berikut ini diperoleh dari laporan-laporan evaluasi kinerja (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja-RKA-DPA-DPPA dsb). Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2,

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah				85	100	100	100	100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat ketercapaian target Pembangunan Daerah yang berkategori * Baik				96,50	100	100	100	100	96,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan				80	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah				BB	BB	A	A	A	BB	BB	BB (78,155)	BB (78,175)	A	100	100	100	100	100
5	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah				100	100	100	100	100	97,43	98	95,05	97,08	33,54 (92,38)	100	100	98	98	-
6	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah				-		1	1	1	-	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				56,05	65	75	75	80,00	56,05	70	80	80	80	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis Bappppeda dalam mendukung tujuan visi, dan misi Pemerintah Daerah yaitu “meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator Prosentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tingkat ketercapaian target Pembangunan yang berkategori Baik“ pada tahun 2018 sampai dengan 2022 telah melampaui target yang ditetapkan (tercapai  $\geq$  100%) yaitu sebesar 100 % Begitu pula Sasaran satregis yang ke dua yaitu Prsentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Implementasikan tahun 2018 sampai dengan 2022 capaian kinerja sasaran juga telah melampaui target yang ditetapkan (tercapai  $\geq$  100%) dengan persentase capaian sebesar 100%.

## **2.4 Tantangan dan Peluang BAPPPEDA**

Bapppeda sebagai Lembaga di daerah sebagai penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan badan yang dapat mengkoordinasikan lintas bidang untuk pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tantangan dan peluang yang dihadapi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang berpotensi semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh BAPPPEDA Kabupaten Sumedang menuntut peningkatan peran dan kapasitas BAPPPEDA dalam menciptakan berbagai Kebijakan Pembangunan Daerah yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah antara lain adalah :

- a. Perlambatan ekonomi, ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam. Ketidakpastian tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kondisi nasional dan daerah;
- b. Pandemi Covid meningkatkannya angka kemiskinan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan, sedikit banyak pasti akan menyulitkan pemerintah daerah dalam memulihkan perekonomian;
- c. Masih kurangnya minat investasi di Kabupaten Sumedang;
- d. Faktor yang mempengaruhi kurangnya minat investasi di Kabupaten Sumedang dari sisi kondisi Infrastruktur pendukung investasi hanya berpusat pada beberapa wilayah tertentu, tidak tersebar secara merata;
- e. Masyarakat belum terbiasa untuk berinvestasi pada barang yang tak terlihat, lebih menyukai jenis investasi yang jelas-jelas terlihat wujud;

- f. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer dalam Pendanaan Pembangunan. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan memberikan transfer kepada daerah.
- g. Dana transfer (Dana Perimbangan) diberikan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah yaitu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- h. Kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih rendah dalam menjalankan otonomi daerah.
- i. Masih banyak Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki kategori kurang dan sangat kurang, hal ini memperlihatkan kebutuhan anggaran daerah yang besar dan tidak sebanding dengan peningkatan PAD.

*Tabel 2.3 Kemandirian Fiskal (IF) Kabupaten/Kota di Jawa Barat*

No.	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
1	Prov. Jawa Barat	2.546	Sangat Tinggi
2	Kab. Bandung	1.905	Tinggi
3	Kab. Bekasi	1.688	Sedang
4	Kab. Bogor	1.984	Tinggi
5	Kab. Ciamis	1.165	Sangat Rendah
6	Kab. Cianjur	1.804	Sedang
7	Kab. Cirebon	1.376	Rendah
8	Kab. Garut	1.270	Rendah
9	Kab. Indramayu	1.088	Sangat Rendah
10	Kab. Karawang	1.731	Sedang
11	Kab. Kuningan	1.329	Rendah
12	Kab. Majalengka	1.901	Tinggi
13	Kab. Purwakarta	1.371	Rendah



<b>No.</b>	<b>Nama Daerah</b>	<b>Rasio KFD</b>	<b>Kategori KFD</b>
14	Kab. Subang	1.134	Sangat Rendah
15	Kab. Sukabumi	1.746	Sedang
16	Kab. Sumedang	1.045	Sangat Rendah
17	Kab. Tasikmalava	1.174	Rendah
18	Kota Bandung	1.301	Rendah
19	Kota Bekasi	1.505	Sedang
20	Kota Bogor	1.434	Rendah
21	Kota Cirebon	1.471	Rendah
22	Kota Depok	2.625	Sangat Tinggi
23	Kota Sukabumi	1.191	Rendah
24	Kota Tasikmalava	1.162	Sangat Rendah
25	Kota Cimahi	1.059	Sangat Rendah
26	Kota Banjar	1.032	Sangat Rendah
27	Kab. Bandung Barat	1.432	Rendah
28	Kab. Pangandaran	2.186	Sangat Tinggi

*Sumber : lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 193 /pmk.07 /2022 tentang peta kapasitas fiskal daerah*



Gambar 2. 5 Daftar Aset Sampai Dengan Tahun 2022 Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Sumedang yang terkategori kurang maka Kabupaten Sumedang masih harus menggali sumber – sumber potensial untuk meningkatkan objek pajak, karena berdasarkan perkembangan peranan PAD dalam meningkatkan aktifitas perekonomian belum optimal. Perencanaan aktifitas perekonomian yang terarah dan konsisten merupakan kunci utama untuk meningkatkan nilai PAD.

**a. Tantangan**

1. Ancaman Daya saing Kabupaten tetangga yang lebih potensial dalam produksi barang dan jasa Pembangunan ekonomi daerah yang telah disusun diharapkan dapat mampu menghasilkan produk unggulan yang bermutu serta berdaya saing dalam kompetisi perdagangan bebas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti halnya Kabupaten Sumedang yang memiliki produk – produk unggulan baik barang maupun jasa, diantaranya produksi : Ubi Cilembu, Sawo Sukatali, dan Mangga Gedong Gincu yang cukup populer di Jawa Barat namun disatu sisi daerah tetangga yaitu Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu pun

mempunyai produk unggulan yang sama yaitu Mangga Gedong Gincu, bahkan masing – masing daerah sudah mampu melakukan ekspor sehingga memunculkan daya saing daerah yang cukup tinggi. Daya saing lainnya yaitu dibidang jasa pendidikan, Kabupaten Sumedang yang merupakan daerah dengan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, disamping itu pertumbuhan jasa bimbingan belajar juga cukup berkembang untuk menunjang proses pendidikan di Kabupaten Sumedang. optimal dalam melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah yang secara terfokus mengarah kepada produk – produk unggulan daerah masing – masing agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas minimal di wilayahnya sendiri dengan kata lain dapat bersaing dengan kabupaten – kabupaten tetangga. Dengan harapan tersebut maka diperlukan berbagai macam upaya yang dapat menunjang percepatan pengembangan produk unggulan berorientasi pasar yang memperhatikan berbagai peluang bisnis dan investasi yang secara nyata dapat meningkatkan daya saing produk sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi daerahnya.

#### **b. Peluang**

1. Sumedang merupakan Kawasan Strategis Nasional Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPPEDA tidak terlepas dari dukungan peraturan perundangan yang ada, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan teknis yang dikeluarkan Kementerian baik secara vertikal maupun horizontal. Undang-undang yang sangat signifikan mengubah peran instansi perencana di daerah yang mendukung pelaksanaan sistem desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah adalah Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang memungkinkan pemerintah daerah berperan dalam menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
2. Pemanfaatan IPTEK disemua aspek sejalan dengan era industry 4.0. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan

faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjamin kehidupan yang lebih baik untuk warga Kabupaten Sumedang dukungan IPTEK perlu terus dikembangkan, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Dalam konteks tugas dan fungsinya, BAPPPEDA perlu mendorong Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten Sumedang untuk memanfaatkan IPTEK, antara lain dengan mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan data dan analisisnya dalam menyusun perencanaan (program dan kegiatan). Lebih lanjut BAPPPEDA perlu mengoptimalkan pemanfaatan data dan analisa yang dihasilkan dari pengembangan system informasi dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga hal tersebut dapat mendorong pemanfaatan EPlanning, E-Budgeting yang lebih tepat guna. Hal ini menjadi peluang bagi BAPPPEDA dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Sumedang.

### 3. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat atau stakeholder merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa-memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, manifestasi partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan dari sektor Korporasi maupun dari Perguruan Tinggi dalam berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Dalam konteks ini Kabupaten Sumedang memiliki peluang yang tinggi karena banyak terdapat perguruan tinggi berkualitas di Kabupaten Sumedang, serta pembangunan

megaproyek di Kabupaten Sumedang dapat menjadi momentum menarik korporasi untuk berpartisipasi berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Bappppeda tidak hanya menjadi koordinator dalam penyusunan kebijakan, namun juga menjalankan peran dalam mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan menjadi bagian dari tanggungjawab Bappppeda dalam hal penilaian kinerja. Koordinasi yang intens serta sinkronisasi diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan, dan didukung data yang terintegrasi antar sektor. Perencanaan teknokratis berbasis data didukung dengan tata kelola data yang valid, penggalan data melalui metode yang tepat, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penelitian terhadap berbagai kebutuhan pembangunan yang dirangkum menjadi data yang siap diolah untuk menjadi bahan kebijakan perencanaan selanjutnya. Selain hal tersebut di atas, pemanfaatan teknologi informasi juga sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.

Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan pada beberapa permasalahan yang secara umum terjadi karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum teratasi

oleh peluang yang belum dimanfaatkan. Adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah*

No.	Masalah Pokok	Akar msalah
	Bidang Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	
	Kualitas dokumen perencanaan yang perlu ditingkatkan	Penyusunan perencanaan dan pendanaan yang belum konsisten
		Ketersediaan data pembangunan yang berkualitas, valid dan reliable
		evaluasi yang tidak dijadikan landasan dalam perencanaan
	Bidang PPM, PSDA, Inpraswil	
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal	Koordinasi perencanaan secara internal dan eksternal yang belum optimal pada mitra bidang PPM yang belum optimal
		Koordinasi perencanaan secara internal dan eksternal yang belum optimal pada mitra bidang PSDA yang belum optimal
		Koordinasi perencanaan secara internal dan eksternal yang belum optimal pada mitra bidang Inpraswil yang belum optimal
	Bidang Penelitian dan Pengembangan daerah Sumedang	

	Hasil penelitian dan inovasi yang belum optimal diimplementasikan	Penelitian yang belum sesuai kebutuhan/tidak relevan
		Atensi terhadap kelitbangan yang masih rendah
		Concern terhadap kelitbangan yang masih rendah
		Atensi terhadap kelitbangan yang masih rendah
		Manajemen pengelolaan hasil kelitbangan

### 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Kab/Kota

Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2020-2024 memiliki 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien;

Dari tiga tujuan tersebut, Kementerian Bappenas menetapkan empat sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan yaitu :

*Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra K/L*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional 2. Terwujudnya	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
	efektifitas pengendalian pembangunan nasional	
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L 2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Dari empat sasaran Kementerian PPN/Bappenas tersebut, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan Bappppeda Sumedang adalah sasaran 1 dan 4.

*Tabel 3.3*  
*Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappppeda Kabupaten*  
*Sumedang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor*  
*Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya*

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappppeda Kab. Sumedang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional 2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya integrasi e-planning, e-budgetting secara utuh;	Tingkatkan penggunaan e-planning e-budgetting dalam menyeleksi prioritas pembangunan yang berkontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam visi misi.	Tingkatkan pemanfaatan e-planning e-budgetting dalam menyeleksi program prioritas yang mampu bersaing dengan program unggulan dengan kabupaten tetangga.
2	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Masih kurangnya SDM pada sector strategis;	Terapkan manajemen talenta (knowledge pool) untuk bisa memanfaatkan secara optimal seluruh program strategis dalam KSN di kab Sumedang;	Tingkatkan keterampilan SDM pada sektor strategis untuk menaikkan kemampuan promosi potensi unggulan Daerah;

### 3.3 Telaah Tata Ruang dan Dokumen KLHS

Lingkungan Hidup Startegis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Perkembangan wilayah saat ini membutuhkan upaya perencanaan sekaligus pengendalian pembangunan yang dilakukan di segala sektor secara sinergis, berkesinambungan, dan pro-lingkungan. KLHS merupakan instrumen utama untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. KLHS wajib disusun oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) dengan RPD Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dengan RTRW, KLHS dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. Adapun telaahan strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappppeda diperoleh baik berasal dari analisis



internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappppeda di masa Tiga tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, maka terdapat 5 (lima) akar masalah dan 4 (empat) isu strategis di Bappppeda Kabupaten Sumedang, yaitu :

*Tabel 3.4 Akar Masalah dan Isu Strategis*

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>
Kualitas dokumen perencanaan yang perlu ditingkatkan	Perencanaan lintas sektoral (cross cutting) yang belum optimal	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan
	Data dan evaluasi sebagai input perencanaan yang belum valid	Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia
	Koordinasi perencanaan secara internal dan eksternal yang belum optimal	Inovasi dan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
Hasil penelitian dan inovasi yang belum optimal diimplementasikan	Penelitian yang belum sesuai kebutuhan/tidak relevan	Penguatan fungsi kelitbangan sebagai acuan perencanaan pembangunan
	Atensi terhadap kelitbangan yang masih rendah	

## **BAB IV**

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Tujuan dan sasaran Renstra RPD tahun 2024-2026 Kabupaten Sumedang, menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Adapun tujuan dari BAPPPPEDA adalah :

#### ***Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan dan capaian Kinerja Pemerintah Daerah.***

Tujuan ini dimaknai bahwa Bappppeda perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai hasil pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah
2. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah

Maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan BAPPPPEDA untuk periode 2024–2026.

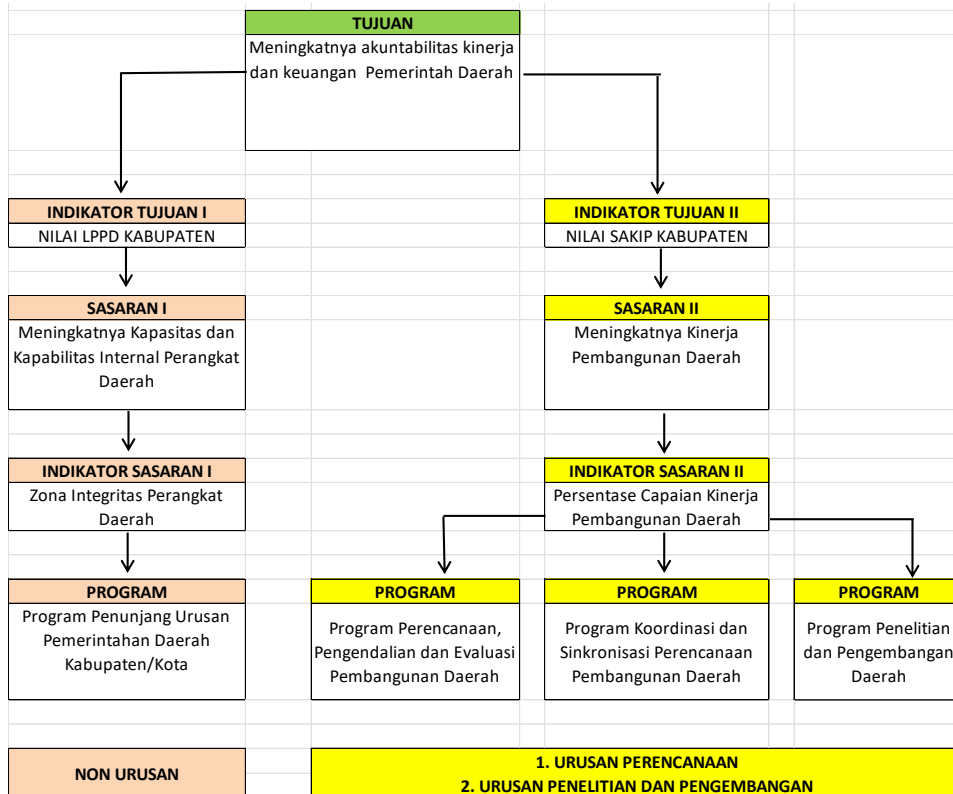
Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran BAPPPPEDA dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran BAPPPEDA

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2024	2025	2026
Terwujudnya tata Kelola pemerintah yang inovatif dan kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan dan capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	A	A	A
		Nilai LPPD Kabupaten	3,76	3,78	3,80

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	Formulasi Perhitungan	TARGET		
				2024	2025	2026
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan dan capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai ZI	94,88	94,98	95
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Capaian kinerja pembangunan daerah tahun}}{\text{Target pembangunan daerah tahun}} \times 100\%$	92,66	92,96	93,34

## 4.2 Cascading Kinerja Bapppeda



## BAB V

## STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BAPPPEDA

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BAPPPEDA memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran BAPPPEDA periode 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan BAPPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

*Tabel 5.1 Identifikasi Kekuatan, kelemahan, Peluang Dan Tantangan Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal*

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
	Sarana / prasarana Kerja yang memadai		Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan
	Kualitas SDM yang memadai		Belum adanya sistem baku mampu mengakomodir dinamika perubahan kebijakan
	Motivasi bekerja yang		Belum optimalnya

	berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas		pelaksanaan monitoring dan evaluasi
	Adanya forum data pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pembangunan		Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>			
<b>No.</b>	<b>PELUANG (O)</b>	<b>No.</b>	<b>ANCAMAN (T)</b>
	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM		Kurangnya komitmen kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
	Perkembangan teknologi/sistem informasi		Sistem informasi yang digunakan dalam semua proses siklus pembangunan yang belum terintegrasi secara optimal
	Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tinggi		Belum optimalnya keberadaan forum Pentahelix (akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah dan media massa) dalam mendukung perencanaan pembangunan

## 5.2 Arah Kebijakan Kebijakan yang diterapkan oleh BAPPPEDA

**Kabupaten Sumedang adalah :**

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Mengoptimalkan koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan melalui bilateral dan trilateral desk;
3. Mengoptimalkan pengaplikasian sistem satu data pembangunan;
4. Peningkatan kapasitas analisis data pembangunan;
5. Peningkatan koordinasi unit pengendalian, pemantauan dengan unit perencanaan dalam hal pencapaian target rencana pembangunan;
6. Melakukan telaahan keperluan jenis kelitbangan untuk Mengakselerasi pembangunan;
7. Melakukan kegiatan kelitbangan untuk menghasilkan output yang dapat mengakselerasi pembangunan

**BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappppeda Kabupaten Sumedang maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1 Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.

*Tabel 6.1 Rencana program dan kegiatan*

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran	TARGET		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Terwujudnya tata Kelola pemerintah yang inovatif	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan dan capaian	Nilai Sakip Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7 Kegiatan	32



Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran	TARGET		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
dan kolaboratif	Kinerja Pemerintah Daerah		Daerah Kabupaten		
		Nilai LPPD Kabupaten	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3 Kegiatan	11
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Kegiatan	18
			Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4 Kegiatan	8

Tabel 6.2 Rencana program dan kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	program kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah				Nilai Sakip Kabupaten	BB	A (80) Kategori	A (82) Kategori		A (82) Kategori		A (86) Kategori		A (86) Kategori	-	
				Nilai LPPD Kabupaten	3,40	3,65 Skor	3,76 Skor		3,78 Skor		3,80 Skor		3,80 Skor	-	
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah	94,88	94.98	95		96	13.664.124.992	15.030.537.492	16.533.591.241	97	45.228.253.725	Bappppeda
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	A		A	13.664.124.992	15.030.537.492	16.533.591.241	A	45.228.253.725	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01,201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 laporan	6 laporan	6 laporan	125.21 5.585	6 laporan	137.73 7.144	6 laporan	151.51 0.858	6 laporan	414.463.586	Bappppeda
		01,201,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	5 dok (Renstra, Renja.M, Renja.P, Probis, RUP)	5 dok (Renstra, Renja.M, Renja.P, Probis, RUP)	44.165 .000	5 dok (Renstra, Renja.M, Renja.P, Probis, RUP)	48.581 .500	5 dok (Renstra, Renja.M, Renja.P, Probis, RUP)	53.439 .650	5 dok (Renstra, Renja.M, Renja.P, Probis, RUP)	146.186.150	Bappppeda
		01,201,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dok (RKA,KAK,SOP, MR)	1 dok (RKA,KAK, SOP,MR)	11.211 .585	1 dok (RKA,KAK, SOP,MR)	12.332 .744	1 dok (RKA,KAK,SO P,MR)	13.566 .018	1 dok (RKA,KAK, SOP,MR)	37.110.346	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01,201,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	7.249.000	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	7.973.900	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	8.771.290	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	23.994.190	Bappppeda
		01,201,04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	5.170.000	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	5.687.000	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	6.255.700	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	17.112.700	Bappppeda
		01,201,05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	6.490.000	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	7.139.000	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	7.852.900	1 dok (RKA,KAK,SOP,MR)	21.481.900	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD											
		01,201,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 dokumen	8 dok (Lap.kinerja, LKPJ, LPPD, SAKIP, SPIP, RB, ZI, SKM)	8 dok (Lap.kinerj a, LKPJ, LPPD, SAKIP, SPIP, RB, ZI, SKM)	50.930.000	8 dok (Lap.kinerj a, LKPJ, LPPD, SAKIP, SPIP, RB, ZI, SKM)	56.023.000	8 dok (Lap.kinerja, LKPJ, LPPD, SAKIP, SPIP, RB, ZI, SKM)	61.625.300	8 dok (Lap.kinerj a, LKPJ, LPPD, SAKIP, SPIP, RB, ZI, SKM)	168.578.300	Bapppppe da
		01,202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Keuangan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	8.612.407.832	3 laporan	9.473.648.616	3 laporan	10.421.013.477	3 laporan	28.507.069.925	Bapppppe da

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01,202,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang	58 Orang	58 Orang	8.585.842.832	58 Orang	9.444.427.116	58 Orang	10.388.869.827	58 Orang	28.419.139.775	Bappppeda
		01,202,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	9.680.000	2 dokumen	10.648.000	2 dokumen	11.712.800	2 dokumen	32.040.800	Bappppeda
		01,202,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	16.885.000	12 laporan	18.573.500	12 laporan	20.430.850	12 laporan	55.889.350	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				nan/Semesteran SKPD											
		01,203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	4 laporan	53.900.000	4 laporan	59.290.000	4 laporan	65.219.000	4 laporan	178.409.000	Bappppeda
		01,203,01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	9.350.000	2 dokumen	10.285.000	2 dokumen	11.313.500	2 dokumen	30.948.500	Bappppeda
		01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 Dokumen	9.350.000	1 Dokumen	10.285.000	1 Dokumen	11.313.500	1 Dokumen	30.948.500	Bappppeda



Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	12 Laporan	17.600.000	12 Laporan	19.360.000	12 Laporan	21.296.000	12 Laporan	58.256.000	Bappppeda
		01,203,06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	17.600.000	12 laporan	19.360.000	12 laporan	21.296.000	12 laporan	58.256.000	Bappppeda
		01,205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	4 laporan	323.818.000	4 laporan	356.199.800	4 laporan	391.819.780	4 laporan	1.071.837.580	Bappppeda
		01,205,02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	109.758.000	1 paket	120.733.800	1 paket	132.807.180	1 paket	363.298.980	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01,205,03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	38.500.000	4 dokumen	42.350.000	4 dokumen	46.585.000	4 dokumen	127.435.000	Bappppeda
		01,205,09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	3 orang	3 orang	66.880.000	3 orang	73.568.000	3 orang	80.924.800	3 orang	221.372.800	Bappppeda
		01,205,11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	90 orang	90 orang	108.680.000	90 orang	119.548.000	90 orang	131.502.800	90 orang	359.730.800	Bappppeda
		01,206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi	8 laporan	8 laporan	8 laporan	1.444.	8 laporan	1.588.	8 laporan	1.747.	8 laporan	4.780.824.752	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<i>Umum Perangkat Daerah</i>				357.93 1		793.72 4		673.09 7			
		01,206,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	275.60 4.120	1 paket	303.16 4.532	1 paket	333.48 0.985	1 paket	912.249.637	Bappppeda
		01,206,03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	116.02 2.819	1 paket	127.62 5.101	1 paket	140.38 7.611	1 paket	384.035.531	Bappppeda
		01,206,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	277.83 9.540	1 paket	305.62 3.494	1 paket	336.18 5.843	1 paket	919.648.877	Bappppeda
		01,206,05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	133.97 1.464	1 paket	147.36 8.610	1 paket	162.10 5.471	1 paket	443.445.546	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01,206,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	31.930.800	28 dokumen	35.123.880	28 dokumen	38.636.268	28 dokumen	105.690.948	Bappppeda
		01,206,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	500.000.000	12 laporan	550.000.000	12 laporan	605.000.000	12 laporan	1.655.000.000	Bappppeda
		01,206,10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	33.000.000	1 dokumen	36.300.000	1 dokumen	39.930.000	1 dokumen	109.230.000	Bappppeda
		01,206,11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75.989.188	1 dokumen	83.588.107	1 dokumen	91.946.917	1 dokumen	251.524.212	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Elektronik pada SKPD											
		01,207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	4 laporan	3 laporan	681.87 4.664	3 laporan	750.06 2.130	3 laporan	825.06 8.343	3 laporan	2.257.005.13 8	Bappppeda
		01,207,02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	1 unit	247.48 0.000	1 unit	272.22 8.000	1 unit	299.45 0.800	1 unit	819.158.800	Bappppeda
		01,207,05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	113.33 3.000	10 unit	124.66 6.300	10 unit	137.13 2.930	10 unit	375.132.230	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01,207,06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	321.06 1.664	10 unit	353.16 7.830	10 unit	388.48 4.613	10 unit	1.062.714.10 8	Bappppeda
		01,207,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Bappppeda
		01,208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1.416. 889.98 0	3 laporan	1.558. 578.97 8	3 laporan	1.714. 436.87 6	3 laporan	4.689.905.83 4	Bappppeda
		01,208,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	12 laporan	1 laporan	188.81 6.980	1 laporan	207.69 8.678	1 laporan	228.46 8.546	1 laporan	624.984.204	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				dan Listrik yang Disediakan											
		01,208,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	117.073.000	1 laporan	128.780.300	1 laporan	141.658.330	1 laporan	387.511.630	Bappppeda
		01,208,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	5 laporan	1 laporan	1.111.000.000	1 laporan	1.222.100.000	1 laporan	1.344.310.000	1 laporan	3.677.410.000	Bappppeda
		01,209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1.005.661.000	4 laporan	1.106.227.100	4 laporan	1.216.849.810	4 laporan	3.328.737.910	Bappppeda



Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pemerintahan Daerah											
		01,209,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	37 unit	37 unit	327.580.000	37 unit	360.338.000	37 unit	396.371.800	37 unit	1.084.289.800	Bappppeda
		01,209,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	92 unit	92 unit	66.000.000	92 unit	72.600.000	92 unit	79.860.000	92 unit	218.460.000	Bappppeda
		01,209,09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit	1 unit	1 unit	114.991.800	1 unit	126.490.980	1 unit	139.140.078	1 unit	380.622.858	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi											
		01,209,10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	497.08 9.200	1 unit	546.79 8.120	1 unit	601.47 7.932	1 unit	1.645.365.25 2	Bappppeda
			PERENCANAAN							-		-	-		
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah			<i>Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</i>	91,92	92,30	92,66	7.982. 250.00 0	92,96	8.780. 475.00 0	93,34	9.658. 522.50 0	93,34	26.421.247.5 00	
		5,01,02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	<i>Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran</i>	96,30%	97,04%	97,78%	2.277. 000.00 0	98,52%	2.504. 700.00 0	99,26%	2.755. 170.00 0	99,26%	7.536.870.00 0	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Program pembangunan daerah</i>											
		5,01,02,20 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah dokumen Perencanaan dan pendanaan</i>	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.885.000.000	2 dokumen	2.073.500.000	3 dokumen	2.280.850.000	3 dokumen	6.239.350.000	Bappppeda
		5,01,02,20 1,01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.500.000	1 dokumen	165.500.000	Bappppeda
		5,01,02,20 1,02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	35.000.000	2 dokumen	38.500.000	3 dokumen	42.350.000	3 dokumen	115.850.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kebijakan Lainnya												
		5,01,02,20 1,03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	2 berita acara	2 berita acara	100.00 0.000	1 berita acara	110.00 0.000	2 berita acara	121.00 0.000	2 berita acara	331.000.000	Bappppeda
		5,01,02,20 1,04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	54 berita acara	108 berita acara	54 berita acara	50.000 .000	54 berita acara	55.000 .000	108 berita acara	60.500 .000	108 berita acara	165.500.000	Bappppeda
		5,01,02,20 1,05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	2 berita acara	2 berita acara	400.00 0.000	1 berita acara	440.00 0.000	2 berita acara	484.00 0.000	2 berita acara	1.324.000.00 0	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,02,20 1,03	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	633 Usulan	710 usulan	1371 usulan	50.000.000	1371 usulan	55.000.000	1371 usulan	60.500.000	1371 usulan	165.500.000	Bappppeda
		5,01,02,20 1,07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.200.000.000	2 dokumen	1.320.000.000	3 dokumen	1.452.000.000	3 dokumen	3.972.000.000	Bappppeda
		5,01,02,20 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah data yang digunakan dalam perencanaan</i>	3 laporan	3 laporan	3 laporan	139.000.000	3 laporan	152.900.000	3 laporan	168.190.000	3 laporan	460.090.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,02,20 2,01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 masukan	1 masukan	1 Dokumen	15.000 .000	1 Dokumen	16.500 .000	1 Dokumen	18.150 .000	1 Dokumen	49.650.000	Bappppeda
		5,01,02,20 2,02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28 orang	28 orang	28 orang	74.000 .000	28 orang	81.400 .000	28 orang	89.540 .000	28 orang	244.940.000	Bappppeda
		5,01,02,20 2,03	Penyusunan Profil Pembangunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan	7 buku	7 buku	7 buku	50.000 .000	7 buku	55.000 .000	7 buku	60.500 .000	7 buku	165.500.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Daerah Kabupaten/Kota	Daerah yang Diterbitkan											
		5,01,02,203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	253.000.000	1 laporan	278.300.000	1 laporan	306.130.000	1 laporan	837.430.000	Bappppeda
		5,01,02,203,03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 laporan	8 laporan	8 laporan	253.000.000	8 laporan	278.300.000	8 laporan	306.130.000	8 laporan	837.430.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	94,01	94,51	95,00	1.750.000,00	95,39	1.925.000,00	95,74	2.117.500,00	95,74	5.792.500,00	Bappppeda
				2. Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	84,23	84,65	85,06	1.012.500,00	85,49	1.113.750,00	85,84	1.225.125,00	85,84	3.351.375,00	Bappppeda



Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<i>3 Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	90,07	90,89	91,55	1.611.750.000	92,21	1.772.925.000	92,88	1.950.217.500	92,88	5.334.892.500	Bappppeda
		5,01,03,201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase Capaian kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	97,01	97,50%	97,99%	1.750.000.000	98,48	1.925.000.000	98,97%	2.117.500.000	98,97%	5.792.500.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 1,01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.00 0.000	2 dokumen	330.00 0.000	2 dokumen	363.00 0.000	2 dokumen	993.000.000	Bappppeda
		5,01,03,20 1,02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26 perangkat daerah	26 laporan	2 laporan	50.000 .000	2 laporan	55.000 .000	2 laporan	60.500 .000	2 laporan	165.500.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 1,03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	150.00 0.000	2 laporan	165.00 0.000	2 laporan	181.50 0.000	2 laporan	496.500.000	Bappppeda
		5,01,03,20 1,04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	150.00 0.000	4 laporan	165.00 0.000	4 laporan	181.50 0.000	4 laporan	496.500.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 1,05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Pembangunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.00 0.000	2 dokumen	330.00 0.000	2 dokumen	363.00 0.000	2 dokumen	993.000.000	Bappppeda
		5,01,03,20 1,06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18 perangkat daerah	18 Laporan	2 Laporan	50.000 .000	2 Laporan	55.000 .000	2 Laporan	60.500 .000	2 Laporan	165.500.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 1,07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18 perangkat daerah	18 laporan	2 laporan	500.00 0.000	2 laporan	550.00 0.000	2 laporan	605.00 0.000	2 laporan	1.655.000.00 0	Bappppeda
		5,01,03,20 1,08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	4 laporan	4 laporan	250.00 0.000	4 laporan	275.00 0.000	4 laporan	302.50 0.000	4 laporan	827.500.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase Capaian kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA</i>	96,53	97,49	98,47	1.012.500.000	98,51	1.113.750.000	99,01	1.225.125.000	99,01	3.351.375.000	Bappppeda
		5,01,03,20 2,01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	76.500.000	2 dokumen	84.150.000	2 dokumen	92.565.000	2 dokumen	253.215.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 2,02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 laporan	5 laporan	2 laporan	78.500 .000	2 laporan	86.350 .000	2 laporan	94.985 .000	2 laporan	259.835.000	Bappppeda
		5,01,03,20 2,03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	2 laporan	61.000 .000	2 laporan	67.100 .000	2 laporan	73.810 .000	2 laporan	201.910.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 2,04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 dokumen	3 Laporan	4 Laporan	247.500.000	4 Laporan	272.250.000	4 Laporan	299.475.000	4 Laporan	819.225.000	Bappppeda
		5,01,03,20 2,05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	67.500.000	2 dokumen	74.250.000	2 dokumen	81.675.000	2 dokumen	223.425.000	Bappppeda



Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 2,06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 laporan	2 laporan	2 laporan	67.500 .000	2 laporan	74.250 .000	2 laporan	81.675 .000	2 laporan	223.425.000	Bappppeda
		5,01,03,20 2,07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 dokumen	1 laporan	2 laporan	51.000 .000	2 laporan	56.100 .000	2 laporan	61.710 .000	2 laporan	168.810.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 2,08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	7 dokumen	2 laporan	4 Laporan	363.00 0.000	4 Laporan	399.30 0.000	4 Laporan	439.23 0.000	4 Laporan	1.201.530.00 0	Bappppeda
		5,01,03,20 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase Capaian kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	89,65	90,55	91,45	1.611. 750.00 0	92,37	1.772. 925.00 0	93,30	1.950. 217.50 0	93,3	5.334.892.50 0	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 3,01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	2 Dokumen	30.000 .000	2 Dokumen	33.000 .000	2 Dokumen	36.300 .000	2 Dokumen	99.300.000	Bappppeda
		5,01,03,20 3,02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dinas	2 laporan	2 laporan	25.000 .000	2 laporan	27.500 .000	2 laporan	30.250 .000	2 laporan	82.750.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 3,03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0	0	2 laporan	25.000 .000	2 laporan	27.500 .000	2 laporan	30.250 .000	2 laporan	82.750.000	Bappppeda
		5,01,03,20 3,04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	4 laporan	550.00 0.000	4 laporan	605.00 0.000	4 laporan	665.50 0.000	4 laporan	1.820.500.00 0	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 3,05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	0	0	2 Dokumen	50.000 .000	2 Dokumen	55.000 .000	2 Dokumen	60.500 .000	2 Dokumen	165.500.000	Bappppeda
		5,01,03,20 3,06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	5.000. 000	2 laporan	5.500. 000	2 laporan	6.050. 000	2 laporan	16.550.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,01,03,20 3,07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	487.85 0.000	2 Laporan	536.63 5.000	2 Laporan	590.29 8.500	2 Laporan	1.614.783.50 0	Bappppeda
		5,01,03,20 3,08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 laporan	2 laporan	4 laporan	438.90 0.000	4 laporan	482.79 0.000	4 laporan	531.06 9.000	4 laporan	1.452.759.00 0	Bappppeda
			PENELITIAN DAN												Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PENGEMBANGAN												
		5,05,02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase Implementasi Hasil Penelitian</i>	90%	90%	90,90%	682.000	91,81%	750.200	92,73%	825.220	92,73%	2.257.420.000	Bappppeda
				<i>indeks inovasi daerah</i>	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	649.000	sangat inovatif	713.900	sangat inovatif	785.290	sangat inovatif	2.148.190.000	Bappppeda
		5,05,02,201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	165.000	1 Dokumen	181.500	1 Dokumen	496.500.000	Bappppeda
		5,05,02,201,12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang</i>	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	150.000	1 laporan	165.000	1 laporan	181.500	1 laporan	496.500.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Terkelola dengan Baik											
		5,05,02,202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	375.000.000	2 Dokumen	412.500.000	2 Dokumen	453.750.000	2 Dokumen	1.241.250.000	Bappppeda
		5,05,02,202,02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	137.500.000	1 dokumen	151.250.000	1 dokumen	413.750.000	Bappppeda
		5,05,02,202,04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	137.500.000	1 dokumen	151.250.000	1 dokumen	413.750.000	Bappppeda



Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,05,02,20 2,09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	125.00 0.000	1 dokumen	137.50 0.000	1 dokumen	151.25 0.000	1 dokumen	413.750.000	Bappppeda
		5,05,02,20 2,10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	Bappppeda
		5,05,02,20 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	157.00 0.000	3 Dokumen	172.70 0.000	3 Dokumen	189.97 0.000	3 Dokumen	519.670.000	Bappppeda
		5,05,02,20 3,04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian,	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	82.000 .000	1 dokumen	90.200 .000	1 dokumen	99.220 .000	1 dokumen	271.420.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Perkebunan dan Pangan											
		5,05,02,20 3,05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	Bappppeda
		5,05,02,20 3,10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	82.500.000	1 dokumen	90.750.000	1 dokumen	248.250.000	Bappppeda
		5,05,02,20 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	649.000.000	2 Dokumen	713.900.000	2 Dokumen	785.290.000	2 Dokumen	2.148.190.000	Bappppeda

Tujuan	Sasaran	Kode	program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Perencanaan		target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5,05,02,20 4,10	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	599.00 0.000	1 dokumen	658.90 0.000	1 dokumen	724.79 0.000	1 dokumen	1.982.690.00 0	Bappppeda
		5,05,02,20 4,04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	50.000 .000	1 laporan	55.000 .000	1 laporan	60.500 .000	1 laporan	165.500.000	Bappppeda

## **BAB VII**

### **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Kontribusi setiap Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Peran strategis ini ditunjukkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama empat tahun mendatang agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode RPD.

Bappppeda Sumedang memiliki peran dan fungsi strategis terhadap keberhasilan mengatasi permasalahan pokok dan pencapaian tujuan pembangunan melalui fungsi perencanaan dan pengendalian.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pada bidang urusan perencanaan, Bappppeda Sumedang juga bertanggungjawab untuk memastikan agar proses pelaksanaan program, kegiatan, hingga sub kegiatan dilakukan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Namun demikian, saat ini masih ditemui adanya kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan pencapaian sasaran pembangunan.

Berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut, agar kontribusi Bappppeda Sumedang untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah sesuai dengan tugas fungsinya sebagai Perangkat Daerah dapat dioptimalkan, maka ditetapkan **sasaran** RPD Bappppeda Sumedang yaitu :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator Nilai LPPD;
- b. capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Daerah, dan merupakan tujuan Renstra Bappppeda sedang sasaran Bappppeda Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD berikut :

TUJUAN RPD	SASARAN RPD/ TUJUAN RENSTRA PD	SASARAN RENSTRA PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dan capaian kinerja Pemerintah Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi
				Nilai SAKIP Kabupaten
				Nilai LPPD Kabupaten
		Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah		Nilai Zona Integritas
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN RPD	SASARAN RPD/ TUJUAN RENSTRA PD	SASARAN RENSTRA PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
			Pembangunan Daerah	Mitra Bidang PPM,PSDA.InFraswil
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Hasil Penelitian

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Bappppeda Sumedang 2024-2026 merupakan dokumen yang harus disusun oleh Bappppeda Sumedang dalam merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah. Dokumen ini memuat perencanaan program, kegiatan dan subegiatan dalam periode 3 tahun dari tahun 2024 hingga tahun 2026

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, Bappppeda Sumedang dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Dearah sampai dengan tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas dan fungsi (tusi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku.